

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana sekarang semakin banyak ditemukan disetiap daerah tidak terkecuali daerah kecil sekalipun, hukum tidak boleh melihat siapa pelakunya melainkan harus buta tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman sanksi bagi tindak pidana. Karena Indonesia menganut hukum positif semua kekuasaan ada di hukum, selain itu penegakan hukum harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan karena hukum itu harus buta seperti yang dijabarkan tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum mengatur peradapan manusia untuk menuju kesejahteraan dalam bermasyarakat. Hukum memiliki kekuasaan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain. Di Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang mengedepankan hukum positif dalam peradilan, hukum positif inilah yang menjadikan suatu peraturan perundang-undangan harus tertulis untuk menjadi hukum.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, pembuktian merupakan suatu hal yang penting. Pembuktian ini dapat dilihat dari alat bukti yang ada dipersidangan. Pembuktian sangatlah penting karena seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak apa bila bukti-bukti tersebut sudah mencukupi. Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah antara lain :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.<sup>1</sup>

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat dipertimbangkan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Sehingga tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Mengenai saksi di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>2</sup>

Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun

---

<sup>1</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana)

<sup>2</sup> ibid

seiring perkembangan zaman keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi *Justice Collaborator*.

Dalam sistem peradilan di Indonesia ada istilah “saksi *justice collaborator*” yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang lebih baik dan dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana narkoba korupsi, terorisme dan pencucian uang.

Dalam KUHP tidak ditemukan atau tidak diatur tentang keberadaan saksi *justice collaborator* akan tetapi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Saksi *justice collaborator* didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal kepada saksi tersebut diberikan keistimewaan. Adapun keistimewaan yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi.

Akan tetapi dalam perakteknya di Peradilan banyak masyarakat khususnya terdakwa itu sendiri yang tidak mengetahui tentang hak-haknya sebagai saksi *justice collaborator*, sehingga banyak hak-hak yang tidak didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa ada pihak yang melakukan pelanggaran HAM, dimana pihak tersebut telah mengesampingkan hak-hak dari terdakwa yang menjadi saksi kunci yang seharusnya mereka dapatkan atas pemberian kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan.

Dari pernyataan diatas jelas terlihat tidak adanya penerapan hukum oleh hakim mengenai SEMA Nomor 4 tahun 2011 pasal 37 dan belum diaturnya perlindungan mengenai terdakwa yang menjadi saksi membuat keamanan dan keselamatan saksi tersebut terancam seperti contoh kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saudara Wijaya dan Arindra dimana saudara Wijaya dan Arindra dijadikan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan yang seharusnya terdakwa ada perlindungan seperti penyembunyian identitas agar keselamatan saksi *justice collaborator* terjamin seharusnya dilakukan akan tetapi tidak dilakukan dalam SEMA tersebut terdakwa yang menjadi saksi kunci hanya diberikan keistimewaan seperti penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Dari kasus diatas timbul bagaimana perlindungan saksi *justice collaborator* didalam lembaga permasyarakatan jika dalam persidangan indentitas seorang *justice collaborator* diketahui oleh terdakwa tersebut karena besar kemungkinan seorang terdakwa menjadi satu dalam sebuah lapas sehingga membuat keselamat *justice collaborator* terancam dan juga keselamatan terhadap keluarga yang menjadi saksi *justice collaborator* juga dapat terancam. Kemungkinan dianiaya sangatlah besar sehingga saksi membutuhkan perlindungan khusus tidak hanya diberikan pengurangan penuntutan. Mengingat dalam undang-undang LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) hanya mengatur

mengenai pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana seperti yang diatur dalam undang-undang LPSK No.31 tahun 2014 pasal 10A yang mengatakan :

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.<sup>3</sup>

Dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang LPSK tersebut hanya mengatur secara umum terhadap perlindungan bagi saksi *justice collaborator* tersebut saat berada didalam lembaga pemasyarakatan yaitu hanya dipisahkan tempat penahanan atau tempat menjalani pidananya saja dimana kemungkinan menjadi satu dalam lapas sangat besar jika mereka melakukan kejahatan didalam wilaya hukum yang sama.

Dari masalah diatas penulis tertarik mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI JUSTICE COLLABORATOR DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (studi di lapas lowokwaru Malang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Apa hak-hak yang seharusnya diperoleh saksi *justice collaborator* didalam Lapas Lowokwaru Malang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi *justice collaborator* di dalam Lapas Lowokwaru Malang?

### **C. ,Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh saksi *justice collaborator*
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap saksi *justice collaborator* didalam lapas.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Memberikan pengetahuan terutama bagi penulis dan bagi para mahasiswa terutama mahasiswa hukum bagaimana dan seperti apa perlindungan hukum bagi saksi *justice collaborator*.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak dilanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan.
- c. Sebagai acuan dalam memberikan wawasan dalam belajar konsentrasi hukum pidana.

## **2. Manfaat praktis**

Diharapkan penulisan ini memberikan wawasan kepada para saksi yang sekaligus menjadi tersangka atau biasa disebut sebagai saksi *justice collaborator* untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai hadiah atas perbuatan nya yang membantu memperlancar proses penggalian informasi oleh hakim.

## **3. Manfaat akademik**

Untuk mendapatkn gelar kesarjanaan ilmu hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkn dapat digunakan untuk meningkat kan pengetahuan dalam hukum yang mana menyangkut hak-hak perlindungan hukum bagi saksi *justice collaborator* dalam hukum pidana. Yang merupakan salah satu ilmu hukum dalam konsentrasi hukum pidana dan di harapkan dapat menjadi referensi penulisan hukum.

### **F. Metode penelitian**

#### **a) Metode pendekatan**

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat .

#### **b) Alasan pemilihan lokasi penelitian**

Alasan peneliti memilih lokasi di lapas Lowokwaru adalah karena data yang akan diteliti berada di Lapas Lowokwaru Malang

#### **c) Jenis data**

##### **1. Data primer**

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama. Dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya adalah saudara edo pitoro dan selamat hadi.

## 2. Data sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain)

## 3. Data Tersier

Adalah jenis data mengenai pengertian buku, istilah buku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary, dan lain-lain.

### **d) Teknik pengumpulan data**

Disini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara dimana sumber utama yang akan diwawancarai yaitu saudara Edo Pinto Dan Selamat Hadi.
2. Observasi dimana peneliti mengobservasi seperti apa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi saksi justice collaborator didalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Dokumentasi dimana dokumen yang dibutuhkan yaitu dari Undang-Undang, penelitian terdahulu dan literatur yang ada dipergustakaan.

### **e) Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data dalam penulisan hukum yang sosiologis adalah analisan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul,



perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis memebagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar memepermudah pemahamnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluanyang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian – kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat antara lain: pengertian pasal perlindungan saksi *justice collaborator*

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis dan kemudian di analisa dan dikaji kesesuain atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (*in fact*) didukung dengan teori – teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini dimana berisi kesimpulan dan pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa.